



PROFIL PNS KABUPATEN BATANG

PERIODE NOVEMBER 2023

REGISTER BPS : K-22.3325.001

Jumlah PNS Kabupaten Batang Berdasarkan

1. PANGKAT DAN GOLONGAN
2. ESELON JABATAN
3. TINGKAT PENDIDIKAN
4. JENIS KELAMIN
5. AGAMA
6. USIA

SIMPEG BKD KAB.BATANG
BIDANG MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk menyusun PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE NOVEMBER 2023 ini. Profil ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu **Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel**, dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE NOVEMBER 2023 ini disusun sebagai salah satu penyedia informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Semoga PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE NOVEMBER 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Potensi Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Batang

Batang, 30 November 2023
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KABUPATEN BATANG

DWI RIYANTO, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197607101996021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 METODE PENYUSUNAN DATA.....	4
1. PENGUMPULAN DATA.....	4
2. PENYAJIAN DATA.....	4
BAB II HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI.....	1
TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN.....	2
TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN.....	2
TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	3
TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	3
TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA.....	6
TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI.....	8
TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN.....	8
TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN.....	9
TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA.....	12
TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA).....	20
TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD.....	25
TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD.....	27
TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD.....	29
TABEL 2.14 JUMLAH PNS BERDASARKAN AGAMA PER-OPD.....	31
TABEL 2.15 JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER-OPD.....	33
GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, sehingga pengaruhnya pada kinerja dan tingkat kehidupan manusia seiring dengan perkembangan global. Era Teknologi Informasi (TI) dimana semua hal ikhwal dapat dijelajahi, ditelusuri bahkan tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Penggunaan Teknologi Informasi dapat menunjang kegiatan kerja atau mempermudah penyelesaian tugas- tugas di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan tugas kedinasan juga akan meningkat. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif.

Setiap pengelola manajemen kepegawaian dituntut untuk bekerja keras meningkatkan mutu dan keakuratan dalam menyajikan data kepegawaian di era yang semakin kompetitif ini. Database yang semakin variatif diperlukan untuk dapat memberikan informasi yang luas bagi pimpinan, sehingga data yang disajikan sangatlah penting untuk menentukan dan mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang strategis secara cepat dan tepat.

Badan Kepegawaian Daerah Batang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dimana diantaranya mencakup pengelolaan data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk

aneka informasi Statistik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi data kepegawaian yang telah disusun sering dimanfaatkan oleh unit kerja, lembaga-lembaga di luar kepegawaian. Kenyataan ini melahirkan pemikiran perlunya data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dibuat dalam bentuk Profil Laporan, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam kualitas sajian yang menarik.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Profil PNS Kabupaten Batang Bulan November Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
- f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 13);
- g. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);

1.3. Maksud dan Tujuan

Profil PNS Pemerintah Kabupaten Batang Bulan November 2023 mengandung maksud dan tujuan:

1. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 44 (empat puluh empat) perangkat daerah sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang.
3. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka

- perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
4. Secara bertahap dan berjangka panjang menyiapkan data dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Batang

1.4 Metode Penyusunan Data

Penyusunan PROFIL PNS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PERIODE NOVEMBER 2023 disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan melakukan peremajaan secara rutin data Sistem Informasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Admin OPD dan diolah oleh tim pengelola database kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dan proses sinkronisasi data / verifikasi dan validasi data kepegawaian. Data kepegawaian yang terkumpul merupakan data akhir dan terbaru, dengan maksud guna memperoleh data yang sesuai dengan peraturan perundangan, tepat, akurat dan akuntabel.

2. Penyajian Data

Data kepegawaian hasil update dari masing-masing instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Batang merupakan data kuantitatif, selanjutnya dihimpun dan dikelompokkan dalam bentuk tabel, untuk selanjutnya dianalisa lalu diambil konklusi sesuai kebutuhan.

BAB II

HASIL PENGOLAHAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data kepegawaian sampai dengan 30 November 2023 diperoleh data kepegawaian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan
2. Jumlah PNS berdasarkan Eselon Jabatan
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
4. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
5. Jumlah PNS berdasarkan Agama
6. Jumlah Jabatan Yang Tersedia dan Terisi
7. Jumlah PNS berdasarkan Kelompok Jabatan Fungsional
8. Jumlah PNS berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah PNS Kabupaten Batang keadaan Bulan **November 2023 adalah 5.327** PNS terinci sebagai berikut :

TABEL 2.1 PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Golongan	Pangkat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/c	Juru	5	1	6
I/d	Juru Tingkat I	57	5	62
II/a	Pengatur Muda	33	2	35
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	76	5	81
II/c	Pengatur	204	117	321
II/d	Pengatur Tingkat I	200	55	255
III/a	Penata Muda	335	569	904
III/b	Penata Muda Tingkat I	340	474	814
III/c	Penata	239	477	716
III/d	Penata Tingkat I	339	614	953
IV/a	Pembina	349	417	766
IV/b	Pembina Tingkat I	159	191	350
IV/c	Pembina Utama Muda	49	15	64
	Jumlah	2385	2942	5327

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS terbanyak adalah PNS Golongan III (3387 PNS) , diikuti PNS Golongan IV (1180 PNS), PNS Golongan II (692 PNS) dan jumlah PNS terendah adalah PNS Golongan I (68 PNS).

TABEL 2.2 PNS BERDASARKAN ESELON JABATAN

Jenis Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Total
Jabatan Fungsional Tertentu	NON	1291	2403	3694
Jabatan Fungsional Umum	NON	834	396	1230
Jabatan Struktural	II.b	25	1	26
Jabatan Struktural	III.a	42	7	49
Jabatan Struktural	III.b	61	35	96
Jabatan Struktural	IV.a	99	71	170
Jabatan Struktural	IV.b	33	29	62
		2385	2942	5327

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa jumlah Eselon PNS terbanyak adalah Eselon IV (232 PNS), diikuti PNS Eselon III (145 PNS), PNS Eselon II (26 PNS).

TABEL 2.3 PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S-3/Doktor	3	1	4
S-2	197	162	359
S-1/Sarjana	1310	1828	3138
Diploma IV	24	76	100
Diploma III/Sarjana Muda	174	693	867
Diploma II	45	24	69
Diploma I	1	4	5
SLTA Kejuruan	44	10	54
SLTA	439	127	566
SLTP Kejuruan	1	0	1
SLTP	101	9	110
Sekolah Dasar	46	8	54
Jumlah	2385	2942	5327

Dari Tabel 2.3 jumlah PNS didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 (3.138 PNS), diikuti oleh tingkat pendidikan D.III (867 PNS) dan paling sedikit adalah tingkat pendidikan S-3 (4 PNS) .

TABEL 2.4 PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	UNOR	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	13	14	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	10	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	31	37	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10	14	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	15	39	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	14	24	38
7	DINAS KESEHATAN	630	156	786
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	11	7	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	16	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	40	51

11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	34	37	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13	19	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15	110	125
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	11	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13	13	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1609	1190	2799
18	DINAS PERHUBUNGAN	4	42	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12	62	74
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18	15	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	24	37
22	DINAS SOSIAL	7	13	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	26	18	44
24	KECAMATAN BANDAR	5	14	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	3	9	12
26	KECAMATAN BATANG	25	46	71
27	KECAMATAN BAWANG	4	9	13
28	KECAMATAN BLADO	5	6	11
29	KECAMATAN GRINGSING	4	8	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	10	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	7	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	16	17
34	KECAMATAN SUBAH	2	10	12
35	KECAMATAN TERSONO	3	9	12
36	KECAMATAN TULIS	2	11	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	8	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	15	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	219	110	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	67	29	96

42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6	39	45
43	SEKRETARIAT DAERAH	33	66	99
44	SEKRETARIAT DPRD	5	24	29
Jumlah		2942	2385	5327

Dari Tabel 2.4 jumlah PNS dengan jenis kelamin perempuan menjadi yang terbanyak (2.942 PNS) sedangkan PNS dengan jenis kelamin laki-laki 2.385 PNS, selisih 557 PNS .

TABEL 2.5 PNS MENURUT AGAMA

No	UNOR	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26	0	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	0	0	0	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	66	1	1	0	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24	0	0	0	0	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	54	0	0	0	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	0	1	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	776	2	7	0	1	0	786
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	18	0	0	0	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	0	0	0	0	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	0	1	0	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	71	0	0	0	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	32	0	0	0	0	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125	0	0	0	0	0	125
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	0	0	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26	0	0	0	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	0	0	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2764	13	22	0	0	0	2799
18	DINAS PERHUBUNGAN	44	1	1	0	0	0	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	74	0	0	0	0	0	74
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33	0	0	0	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36	0	1	0	0	0	37
22	DINAS SOSIAL	20	0	0	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	44	0	0	0	0	0	44

24	KECAMATAN BANDAR	19	0	0	0	0	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	12	0	0	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	71	0	0	0	0	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	13	0	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	11	0	0	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	12	0	0	0	0	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	11	0	0	0	0	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	11	0	0	0	0	0	11
32	KECAMATAN PEALUNGAN	8	0	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	17	0	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	12	0	0	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	12	0	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	13	0	0	0	0	0	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	12	0	0	0	0	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	0	0	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23	0	1	0	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	324	2	2	0	1	0	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	95	0	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	44	1	0	0	0	0	45
43	SEKRETARIAT DAERAH	99	0	0	0	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	29	0	0	0	0	0	29
	JUMLAH	5263	22	40	0	2	0	5327

Dari Tabel 2.5 terlihat jumlah PNS dengan agama mayoritas adalah Islam sebanyak 98% (5263 PNS) dari seluruh PNS sisanya dibagi oleh Protestan (40 PNS), Katholik (22 PNS), Budha (2 PNS) dan Hindu (0 PNS).

TABEL 2.6 PNS BERDASARKAN JUMLAH JABATAN YANG TERSEDIA DAN TERISI

Eselon	Tersedia	Terisi	Kosong
2.a	1	0	1
2.b	32	26	6
3.a	56	49	7
3.b	105	96	9
4.a	190	170	20
4.b	76	62	14
TOTAL	460	403	57

Dari Tabel 2.6 terlihat jumlah jabatan yang paling banyak kekosongan adalah Eselon IV/a (20 jabatan), hanya terisi 170 dari 190 jabatan yang tersedia.

TABEL 2.7 PNS FUNGSIONAL PENDIDIKAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru	4	3	7
2	Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	0	1	1
3	Guru Kelas Ahli Pertama	15	27	42
4	Guru Madya	332	461	793
5	Guru Muda	285	564	849
6	Guru Pendidikan Agama Islam Ahli Pertama	10	15	25
7	Guru Penjasorkes Ahli Pertama	3	0	3
8	Guru Pertama	196	302	498
9	Pamong Belajar Ahli Pertama	0	1	1
10	Pamong Belajar Madya	2	0	2
11	Pamong Belajar Pertama	0	1	1
12	Pamong Budaya Ahli Muda - Subkoordinator Sejarah, Tradisi Dan Tenaga Kebudayaan	0	1	1
13	Pamong Budaya Ahli Pertama	1	0	1
14	Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pai) Smp Madya	0	1	1
15	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum Dan Penilaian Smp	1	0	1
16	Pengawas Sekolah Ahli Muda - Subkoordinator Kurikulum, Penilaian, Pengembangan Peserta Didik Dan Pem	1	0	1

17	Pengawas Sekolah Madya	33	12	45
18	Pengawas Sekolah Madya - Tk/Sd	1	1	2
19	Pengawas Sekolah Muda	1	5	6
20	Penilik Madya	6	0	6
21	Penilik Muda	2	1	3
	Jumlah	893	1396	2289

Dari Tabel 2.7 diatas jumlah fungsional Pendidikan terbanyak disi oleh jabatan Guru (2218 PNS) dari 2289 PNS fungsional pendidikan, sisanya disi Pengawas (56 PNS), Penilik (9 PNS) dan Pamong belajar (6 PNS).

TABEL 2.8 PNS MENURUT FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki_laki	Perempuan	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
2	Apoteker Ahli Madya / Madya	1	3	4
3	Apoteker Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	4	4
4	Apoteker Penyelia	0	1	1
5	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan	0	6	6
6	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan Non BLUD	1	2	3
7	Asisten Apoteker Penyelia	1	13	14
8	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana	0	4	4
9	Bidan Ahli Madya / Madya	0	17	17
10	Bidan Ahli Muda / Muda	0	40	40
11	Bidan Ahli Pertama / Pertama	0	21	21
12	Bidan Mahir / Lanjutan	0	96	96
13	Bidan Pelaksana Lanjutan	0	114	114
14	Bidan Penyelia	0	90	90
15	Bidan Terampil / Pelaksana	0	36	36
16	Dokter Ahli Madya / Madya	22	27	49
17	Dokter Ahli Muda / Muda	0	3	3
18	DOKTER AHLI PERTAMA	1	1	2
19	Dokter Ahli Pertama / Pertama	7	7	14
20	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya	1	4	5
21	Dokter Gigi Ahli Pertama / Pertama	0	7	7
22	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	1	0	1
23	DOKTER SPESIALIS MATA AHLI PERTAMA	0	1	1

24	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	0	2	2
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	2	0	2
26	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	1	2	3
27	Fisioterapis Ahli Pertama / Pertama	0	1	1
28	Fisioterapis Mahir / Lanjutan	1	0	1
29	Fisioterapis Penyelia	1	0	1
30	Nutrisisionis Ahli Madya / Madya NON BLUD	0	1	1
31	Nutrisisionis Ahli Muda / Muda	0	6	6
32	Nutrisisionis Ahli Pertama / Pertama	1	0	1
33	Nutrisisionis Ahli Pertama / Pertama BLUD	0	1	1
34	Nutrisisionis Mahir / Lanjutan	0	1	1
35	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	0	2	2
36	Nutrisisionis Penyelia	0	12	12
37	Okupasi Terapis Terampil / Pelaksana	0	1	1
38	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	0	1	1
39	Penata Anestesi Ahli Madya	1	1	2
40	Penata Anestesi Ahli Muda	2	0	2
41	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	3	4
42	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya / Masyarakat Madya	1	0	1
43	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MADYA NON BLUD	1	0	1
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda / Masyarakat Muda	2	0	2
45	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA - NON BLUD	0	1	1
46	Perawat Ahli Madya	8	21	29
47	Perawat Ahli Muda	13	18	31
48	Perawat Ahli Pertama	15	6	21
49	Perawat Gigi Ahli Muda	0	1	1
50	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	2	3
51	Perawat Gigi Penyelia	1	16	17
52	Perawat Gigi Terampil	1	5	6
53	Perawat Madya	4	9	13
54	Perawat Mahir	1	5	6
55	Perawat Muda	4	10	14
56	Perawat Pelaksana	2	0	2
57	Perawat Pelaksana Lanjutan	4	15	19
58	Perawat Penyelia	63	144	207

59	Perawat Pertama	1	1	2
60	Perekam Medis Pelaksana	5	6	11
61	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
62	Perekam Medis Penyelia	1	5	6
63	Perekam Medis Penyelia NON BLUD	1	0	1
64	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya / Kesehatan Madya	1	0	1
65	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda / Kesehatan Muda	0	2	2
66	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	1	2	3
67	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	6	7
68	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia NON BLUD	0	1	1
69	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana	5	8	13
70	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil / Kesehatan Pelaksana Non BLUD	3	1	4
71	Radiografer Pelaksana	0	2	2
72	Radiografer Penyelia	3	3	6
73	Refraksionis Optisien Penyelia	0	1	1
74	Refraksionis Optisien Terampil / Pelaksana	0	2	2
75	Sanitarian Ahli Madya / Madya	0	2	2
76	Sanitarian Ahli Pertama / Pertama	1	1	2
77	Sanitarian Penyelia	2	4	6
78	TEKNIK ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	0	1
79	Teknisi Elektromedis Ahli Muda / Muda	0	1	1
80	Teknisi Elektromedis Pelaksana	3	0	3
81	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	0	1	1
82	Teknisi Gigi Terampil / Pelaksana	2	0	2
83	Teknisi Transfusi Darah Terampil / Pelaksana	1	1	2
84	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	0	1
	Jumlah	200	835	1035

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat jumlah fungsional Kesehatan terbanyak diisi oleh jabatan Bidan (414 PNS) dari 1035 PNS fungsional Kesehatan dan jabatan Perawat (373 PNS), sedangkan Dokter (70 PNS) dan Dokter Gigi (12 PNS).

TABEL 2.9 PNS FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Jabatan Fungsional Tertentu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN	1	0	1
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DATA, INFORMASI DAN KERJASAM	0	1	1
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	1	0	1
4	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	1	0	1
5	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA (PB)	0	1	1
6	ANALIS AKUAKULTUR AHLI MUDA	0	1	1
7	ANALIS HUKUM AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI	0	1	1
8	ANALIS HUKUM MUDA (PB)	0	1	1
9	ANALIS KEBENCANAAN MUDA (PB)	2	0	2
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	2	4	6
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1	0	1
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR ASPIRASI DAN DOKUMENTASI	1	0	1
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR EVALUASI DAN PELAPORAN	1	0	1
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGANGGARAN	1	0	1
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR FASILITAS PENGAWASAN	1	0	1
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	0	1	1
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1	0	1
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	1	1

19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	1	1
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	1	0	1
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYUSUN PROGRAM	1	0	1
22	ANALIS KEBIJAKAN MUDA (PB)	5	3	8
23	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD	0	1	1
24	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	1	1	2
25	Analisis Kepegawaian Muda	0	1	1
26	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR FORMASI DAN PENGEMBANGAN	1	0	1
27	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR JABATAN	0	1	1
28	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR KENAIKAN PANGKAT	0	1	1
29	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	0	1	1
30	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN	0	1	1
31	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA - SUBKOORDINATOR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	0	1	1
32	Analisis Kepegawaian Pelaksana / Terampil	0	3	3
33	Analisis Kepegawaian Pelaksana / Terampil (BLUD)	1	0	1
34	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	0	1	1
35	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	0	1	1
36	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN	1	0	1
37	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	0	3	3

38	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2	2	4
39	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA (PB)	2	4	6
40	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	0	1	1
41	ANALISIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA	0	1	1
42	ANALISIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	1	0	1
43	ANALISIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PASCA PANEN DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN	0	1	1
44	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	0	1	1
45	Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
46	ANALISIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENELITIAN	0	1	1
47	ANALISIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN PASAR	1	0	1
48	ANALISIS PERDAGANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	0	1	1
49	ANALISIS PERDAGANGAN MUDA (PB)	2	0	2
50	ANALISIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	2	0	2
51	ARSIPARIS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	1	0	1
52	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	0	2	2
53	Arsiparis Mahir	0	1	1
54	ARSIPARIS MUDA (PB)	0	1	1
55	Arsiparis Pelaksana	0	2	2
56	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	1
57	Arsiparis Penyelia	2	0	2
58	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	5	0	5
59	ASESOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA	0	1	1
60	AUDITOR AHLI PERTAMA	0	3	3
61	Auditor Madya	2	1	3

62	Auditor Muda	3	7	10
63	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	2	0	2
64	Instruktur Muda	0	1	1
65	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	0	1	1
66	Mediator Hubungan Industrial Pertama	1	0	1
67	Medik Veteriner Muda (PB)	0	1	1
68	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator Siak) Terampil	9	6	15
69	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	1	0	1
70	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	0	1	1
71	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	0	1
72	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	0	1
73	PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN OLAHRAGA	0	1	1
74	Pemadam Kebakaran Terampil	3	0	3
75	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	1	1	2
76	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN REPRODUKSI, PENGENDA	0	1	1
77	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PELAYANAN KELUAR	1	0	1
78	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGGERAKAN INSTITUSI DAN PERA	1	0	1
79	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYULUH DAN PENGGERAKAN	0	1	1
80	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA (PB)	0	1	1
81	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEDARURATAN DAN LOGISTIK	0	1	1
82	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA (PB)	1	1	2
83	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	1	2	3
84	PENATA RUANG AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG	1	0	1

85	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	1	2
86	PENATA RUANG MUDA (PB)	0	1	1
87	Penera Ahli Pertama	0	2	2
88	Penera Pelaksana	1	1	2
89	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS	0	1	1
90	Pengantar Kerja Pertama	0	2	2
91	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN	1	0	1
92	Pengawas Bibit Ternak Muda	1	0	1
93	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	1	1	2
94	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	1	0	1
95	Pengawas Bibit Ternak Pertama	0	1	1
96	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA (PB)	1	0	1
97	Pengawas Kemetrologian Pertama	1	0	1
98	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, PERIJINAN, KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERAT	1	0	1
99	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
100	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PRODUKSI PERKEBUNAN	1	0	1
101	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN USAHA PETERNAKAN	1	0	1
102	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA (PB)	0	1	1
103	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	1
104	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	2	1	3
105	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Madya	4	0	4
106	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda	1	7	8
107	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Pertama	0	1	1
108	Pengawas Perikanan Pelaksana	1	0	1

109	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KESEHATAN, LINGKUNGAN DAN KAWASAN BUDIDAYA	0	1	1
110	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	1
111	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLIPERTAMA	1	0	1
112	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	3	0	3
113	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	6	0	6
114	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	1	0	1
115	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA (PB)	0	1	1
116	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	0	1	1
117	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN SAMPAH	1	0	1
118	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA (PB)	0	1	1
119	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI PERTAMA	0	1	1
120	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN PELAKSANA/TERAMPIL	0	1	1
121	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	0	1	1
122	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI	1	0	1
123	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	1	0	1
124	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	1	0	1
125	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA (PB)	2	2	4
126	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	2	0	2
127	PENYULUH PERINDUSTRIAN MUDA (PB)	2	0	2
128	Penyuluh Pertanian Madya	8	1	9
129	Penyuluh Pertanian Muda	8	4	12

130	PENYULUH PERTANIAN MUDA (PB)	0	2	2
131	Penyuluh Pertanian Pelaksana	0	2	2
132	Penyuluh Pertanian Pertama	3	9	12
133	PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	1	1
134	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	2	0	2
135	PENYULUH SOSIAL MUDA (PB)	1	0	1
136	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	1	1
137	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1	0	1
138	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMERINTAHAN	0	1	1
139	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH	1	0	1
140	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN	1	0	1
141	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM	3	0	3
141	PERENCANA AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN	3	1	4
142	Perencana Muda	0	1	1
143	PERENCANA MUDA (PB)	8	5	13
144	Perencana Pertama	2	2	4
145	PERISALAH LEGISLATIF MUDA (PB)	1	0	1
146	Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana	3	0	3
147	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN	1	0	1
148	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA (PB)	1	1	2
149	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	0	1	1
150	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	0	2	2
151	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	1	0	1
152	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1	0	1
153	PRANATA HUMAS AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN OPINI DAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	0	1	1
154	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	0	1
155	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA -	1	0	1

	SUBKOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI			
156	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	2
157	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	4	5	9
158	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan BLUD	0	1	1
159	Pranata Komputer Pertama	4	3	7
160	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR LAYANAN, INFORMASI, OTOMASI DAN KERJASAMA	0	1	1
161	PUSTAKAWAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	0	1	1
162	Pustakawan Pelaksana	1	1	2
163	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1	1	2
164	SANDIMAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	1	0	1
165	STATISTISI AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR STATISTIK SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN BUDAYA	1	0	1
166	STATISTISI MUDA (PB)	0	1	1
167	Statistisi Pelaksana	0	1	1
168	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
169	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	3	0	3
170	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA (PB)	1	0	1
171	Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	3	2	5
172	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	1	0	1
173	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	1	0	1
174	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1
175	Teknik Pengairan Pelaksana	2	0	2
176	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN KAWAS	1	0	1
177	Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana	1	1	2
178	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS P	0	1	1
179	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN	0	1	1
180	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PENATAAN	1	0	1

	INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRAS			
181	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA - SUBKOORDINATOR PERTAMANAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	1	0	1
182	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	1	0	1
183	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA (PB)	0	2	2
184	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana	1	1	2
185	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	2	3
	Jumlah	198	172	370

Dari Tabel 2.9 diatas jumlah fungsional Lainnya terbanyak dari jabatan Penyuluh Pertanian (37 PNS) dari 370 PNS fungsional Lainnya.

TABEL 2.10 PNS FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	AHLI PERTAMA GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	2
2	AJUDAN	0	1	1
3	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	0	1
4	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	0	1	1
5	ANALIS BENCANA	1	1	2
6	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	1	4
7	ANALIS HUMAS	1	2	3
8	ANALIS IDEOLOGI	1	0	1
9	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	1	0	1
10	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	1	0	1
11	ANALIS JABATAN	0	1	1
12	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	0	1	1
13	ANALIS KEBIJAKAN BARANG MILIK NEGARA	1	0	1
14	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	0	1	1
15	ANALIS KELUARGA BERENCANA	1	0	1
16	ANALIS KEMASYARAKATAN	0	1	1
17	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA/TERAMPIL	1	0	1
18	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	0	5
19	ANALIS KESEHATAN	2	1	3
20	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	1	0	1
21	ANALIS KEUANGAN	0	2	2
22	ANALIS LAHAN PERTANIAN	1	0	1
23	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	1	0	1
24	ANALIS LAYANAN UMUM	4	8	12
25	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	0	1	1

26	ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	1	2
27	ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	2	1	3
28	ANALIS PARIWISATA	0	1	1
29	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
30	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	0	1	1
31	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	1	0	1
32	ANALIS PENDIDIKAN	2	0	2
33	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	2	0	2
34	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	0	1	1
35	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	1	0	1
36	ANALIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	0	2
37	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS (BLUD)	1	0	1
38	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	1	1	2
39	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	1	0	1
40	ANALIS PERBENDAHARAAN	1	0	1
41	ANALIS PEREKONOMIAN	1	1	2
42	ANALIS PERPUSTAKAAN	1	0	1
43	ANALIS PERTANAHAN	0	1	1
44	ANALIS PESERTA DIDIK	3	1	4
45	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	0	1	1
46	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	2	0	2
47	ANALIS PRODUK HUKUM	1	3	4
48	ANALIS PROTOKOL	0	2	2
49	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	0	1	1
50	ANALIS TAMAN	1	0	1
51	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	0	1	1
52	AUDITOR AHLI PERTAMA	2	1	3
53	BENDAHARA	6	5	11
54	BIDAN TERAMPIL	0	6	6
55	BINATU RUMAH SAKIT	2	0	2
56	DOKTER GIGI - AHLI PERTAMA	0	1	1
57	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	1	0	1
58	GURU	8	4	12
59	GURU KELAS AHLI PERTAMA	16	49	65
60	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	0	1	1
61	GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	44	55	99
62	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	1	1	2
63	JURU PUNGUT RETRIBUSI	45	2	47
64	OPERATOR ALAT BERAT	1	0	1
65	OPERATOR MESIN	1	0	1
66	OPERATOR RADIO	1	1	2
67	OPERATOR TERMINAL	15	0	15
68	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	1	0	1

69	PEMELIHARA JALAN	13	0	13
70	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	1	0	1
71	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA	1	0	1
72	PENELAAH PERKEMBANGAN BUMD	1	0	1
73	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	0	1
74	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	0	1	1
75	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	1	3
76	PENGADMINISTRASI PERIJINAN	1	0	1
77	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	1	2	3
78	PENGADMINISTRASI UMUM	282	89	371
79	PENGADMINISTRASI UMUM BLUD	8	8	16
80	PENGADMINISTRASIAN UMUM	6	1	7
81	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	1	0	1
82	PENGAWAS KOPERASI	1	0	1
83	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	1	0	1
84	PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	1	0	1
85	PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN	2	0	2
86	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2	1	3
87	PENGELOLA BARANG	1	0	1
88	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	4	4	8
89	PENGELOLA BENGKEL	2	0	2
90	PENGELOLA DATA	9	7	16
91	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	2	0	2
92	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	3	0	3
93	PENGELOLA DATA PELAYANAN	1	1	2
94	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	1	0	1
95	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	3	4	7
96	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	0	1	1
97	PENGELOLA GAJI	0	1	1
98	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	1	1	2
99	PENGELOLA KEPERAWATAN	1	0	1
100	PENGELOLA KEUANGAN	51	48	99
101	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	0	1	1
102	PENGELOLA LABORATORIUM	1	2	3
103	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	0	3	3
104	PENGELOLA PASAR	1	0	1
105	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	1	0	1
106	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	1	4	5
107	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	0	1	1
108	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	2	0	2
109	PENGELOLA PENDAPATAN	2	0	2
110	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	1	0	1

111	PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI PERTAMA	0	2	2
112	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	1	2	3
113	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	1	1
114	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	2	8	10
115	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	1	2	3
116	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	0	1	1
117	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	1	0	1
118	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	0	1	1
119	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	1	0	1
120	PENGEMUDI	11	0	11
121	PENGEMUDI AMBULANCE	4	0	4
122	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	1	0	1
123	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	1	0	1
124	PENJAGA PINTU AIR	6	0	6
125	PENYULUH KEPEMUDAAN	1	0	1
126	PENYULUH KOPERASI	0	1	1
127	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	1
128	PENYULUH WISATA	1	0	1
129	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	5	12
130	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	1	0	1
131	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	1	0	1
132	PENYUSUN RENCANA MUTASI	1	0	1
133	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	1	0	1
134	PETUGAS KEAMANAN	5	0	5
135	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	13	0	13
136	PETUGAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	0	1	1
137	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA / TERAMPIL	2	1	3
138	PRAMU BAKTI	105	6	111
139	PRAMU KEBERSIHAN	43	2	45
140	PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN	0	1	1
141	PRANATA KEARSIPAN	0	1	1
142	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0	1
143	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	1	0	1
144	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	1	0	1
145	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	0	1
146	PRANATA TATA PRAJA	2	1	3
147	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	2	0	2

148	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	0	6
149	TENAGA GURU	1	10	11
150	VERIFIKATOR KEUANGAN	1	1	2
	Jumlah	834	396	1230

Dari Tabel 2.10 diatas jumlah fungsional Umum (Pelaksana) terbanyak dari jabatan Pengadministrasi Umum (394 PNS) dari 1.230 PNS fungsional umum.

TABEL 2.11 PNS BERDASARKAN GOLONGAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	0	0	1	5	1	6	1	2	9	1	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	7	1	0	1	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	1	0	2	2	3	12	19	9	9	9	1	1	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	7	7	3	0	0	0	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	0	0	1	7	3	10	5	7	3	2	7	7	1	1	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	18	3	3	7	0	5	1	1	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	0	0	0	1	0	6	49	24	211	118	153	160	15	29	20	0	0	786
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	6	2	1	1	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	2	1	2	4	4	1	9	2	1	0	0	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	15	3	3	5	8	0	4	1	7	4	0	1	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	0	0	1	0	0	2	2	7	17	7	20	6	7	2	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	0	0	2	0	0	4	5	5	1	2	8	3	1	1	0	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	16	7	10	28	15	17	13	5	8	5	0	1	0	0	125
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	3	6	2	1	1	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	1	0	0	1	2	3	4	2	5	7	0	1	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	5	2	4	0	1	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	4	3	11	25	72	82	456	421	388	470	602	254	11	0	0	2799
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	3	0	1	9	7	12	5	0	4	4	0	1	0	0	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	0	1	10	3	9	7	13	12	4	5	6	3	0	1	0	0	74
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	0	0	0	1	2	0	9	8	4	6	1	1	1	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	1	7	5	6	3	1	10	2	1	1	0	0	37
22	DINAS SOSIAL	0	0	0	1	0	0	3	3	3	1	2	4	2	1	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	1	0	1	0	7	2	6	13	7	4	3	0	0	44

24	KECAMATAN BANDAR	0	0	0	0	0	1	3	2	5	3	3	1	1	0	0	0	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	0	0	0	0	4	3	7	9	28	8	9	3	0	0	0	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	1	1	2	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	3	2	0	1	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	4	1	0	0	0	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	0	1	1	0	0	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	1	2	1	1	0	0	0	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	1	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	0	0	0	2	5	2	3	2	2	1	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	1	0	1	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	1	4	1	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	3	1	1	0	0	0	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	0	1	1	0	0	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	3	0	1	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	0	0	1	3	3	4	4	3	3	1	1	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	0	1	1	0	4	23	9	24	59	44	96	38	25	5	0	0	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	0	0	0	0	32	1	14	18	14	12	4	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	2	1	1	9	11	4	4	5	3	4	1	0	0	0	45
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	1	0	2	7	7	26	17	7	12	6	7	7	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	1	0	1	1	4	5	4	5	3	3	1	1	0	0	29
	Jumlah	0	0	6	62	35	81	321	255	904	814	716	953	766	350	64	0	0	5327

TABEL 2.12 JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	< 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	> 61	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	7	4	12	4	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2	2	6	8	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	3	14	31	20	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	4	5	12	3	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	11	11	18	14	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	9	12	6	11	0	38
7	DINAS KESEHATAN	0	25	285	303	173	0	786
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	4	4	5	5	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	4	2	10	10	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	1	3	25	22	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	0	5	20	25	21	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	4	3	9	16	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	9	16	41	59	0	125
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	2	1	11	6	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2	3	9	12	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	2	9	9	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	116	619	765	1299	0	2799
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	9	4	16	17	0	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	0	5	4	22	43	0	74
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	2	6	14	11	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	6	5	18	8	0	37
22	DINAS SOSIAL	0	2	5	6	7	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	3	8	17	16	0	44
24	KECAMATAN BANDAR	0	0	4	3	12	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	1	5	6	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	2	11	32	26	0	71

27	KECAMATAN BAWANG	0	0	0	4	9	0	13
28	KECAMATAN BLADO	0	0	0	3	8	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	2	4	6	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	1	2	8	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	0	0	5	6	0	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	0	0	4	5	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	0	5	12	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	0	2	2	8	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	0	4	8	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	0	1	12	0	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	3	1	8	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	0	4	3	6	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	2	3	10	9	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	0	17	79	182	51	0	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	30	30	30	6	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	4	9	14	18	0	45
43	SEKRETARIAT DAERAH	0	13	20	35	31	0	99
	SEKRETARIAT DPRD	0	2	5	12	10	0	29
	Jumlah	0	305	1212	1751	2059	0	5327

TABEL 2.13 JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	3	0	0	5	1	14	4	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	2	0	0	1	0	11	3	1	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1	2	12	0	0	5	3	33	11	0	67
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	1	0	0	1	0	17	4	1	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0	4	15	0	0	10	3	14	8	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	7	0	0	19	0	11	1	0	38
7	DINAS KESEHATAN	1	5	55	3	0	499	50	157	16	0	786
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	0	0	1	0	0	1	1	11	4	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	2	4	0	0	2	0	13	5	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	12	10	0	0	2	0	13	2	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	1	0	2	0	0	5	4	55	4	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	2	7	0	0	2	1	14	5	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	16	50	0	0	10	4	27	4	0	125
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	0	0	5	0	7	5	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	4	0	0	0	0	15	6	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	4	0	0	1	1	9	5	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	35	193	0	65	25	6	2305	163	1	2799
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	0	19	0	2	11	0	6	5	0	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	6	16	29	0	0	4	0	16	3	0	74
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	9	0	1	8	1	11	3	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1	9	0	0	5	0	18	4	0	37
22	DINAS SOSIAL	1	1	3	1	0	2	1	7	4	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	0	1	1	0	0	1	0	33	7	1	44
24	KECAMATAN BANDAR	0	1	12	0	0	1	0	3	2	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	0	0	4	0	0	0	1	6	1	0	12
26	KECAMATAN BATANG	0	2	24	0	0	4	3	36	2	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	0	0	8	0	0	0	0	3	2	0	13
28	KECAMATAN BLADO	1	2	1	0	0	0	0	6	1	0	11

29	KECAMATAN GRINGSING	0	0	6	0	0	0	0	4	2	0	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	0	0	4	0	0	0	1	5	1	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	0	1	2	0	0	1	0	5	2	0	11
32	KECAMATAN PEALUNGAN	0	0	3	0	0	0	0	4	2	0	9
33	KECAMATAN REBAN	0	0	9	0	0	0	0	6	2	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	0	1	3	0	0	0	0	8	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	0	0	6	0	0	1	0	4	1	0	12
36	KECAMATAN TULIS	0	0	3	0	0	0	0	8	2	0	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	0	0	3	0	0	0	0	7	2	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0	1	3	0	0	1	0	6	2	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	6	0	0	2	1	11	3	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	2	4	32	1	0	163	6	103	18	0	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	0	0	3	0	0	57	5	22	9	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	0	17	0	1	5	0	16	4	0	45
43	SEKRETARIAT DAERAH	1	0	21	0	0	6	6	44	22	0	100
44	SEKRETARIAT DPRD	1	1	7	0	0	2	1	13	4	0	29
	Jumlah	54	111	620	5	69	867	100	3137	360	4	5327

TABEL 2.14 JUMLAH PNS BERDASARKAN AGAMA PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	26	0	1	0	0	0	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	0	0	0	0	0	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	66	1	1	0	0	0	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24	0	0	0	0	0	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	54	0	0	0	0	0	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	37	0	1	0	0	0	38
7	DINAS KESEHATAN	776	2	7	0	1	0	786
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	18	0	0	0	0	0	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26	0	0	0	0	0	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	0	1	0	0	0	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	71	0	0	0	0	0	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	32	0	0	0	0	0	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125	0	0	0	0	0	125
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	0	0	0	0	0	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26	0	0	0	0	0	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	2	0	0	0	0	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2764	13	22	0	0	0	2799
18	DINAS PERHUBUNGAN	44	1	1	0	0	0	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	74	0	0	0	0	0	74
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33	0	0	0	0	0	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	36	0	1	0	0	0	37
22	DINAS SOSIAL	20	0	0	0	0	0	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	44	0	0	0	0	0	44
24	KECAMATAN BANDAR	19	0	0	0	0	0	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	12	0	0	0	0	0	12
26	KECAMATAN BATANG	71	0	0	0	0	0	71
27	KECAMATAN BAWANG	13	0	0	0	0	0	13
28	KECAMATAN BLADO	11	0	0	0	0	0	11
29	KECAMATAN GRINGSING	12	0	0	0	0	0	12

30	KECAMATAN KANDEMAN	11	0	0	0	0	0	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	11	0	0	0	0	0	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	8	0	1	0	0	0	9
33	KECAMATAN REBAN	17	0	0	0	0	0	17
34	KECAMATAN SUBAH	12	0	0	0	0	0	12
35	KECAMATAN TERSONO	12	0	0	0	0	0	12
36	KECAMATAN TULIS	13	0	0	0	0	0	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	12	0	0	0	0	0	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	13	0	0	0	0	0	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23	0	1	0	0	0	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	324	2	2	0	1	0	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	95	0	1	0	0	0	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	44	1	0	0	0	0	45
43	SEKRETARIAT DAERAH	99	0	0	0	0	0	99
44	SEKRETARIAT DPRD	29	0	0	0	0	0	29
	Jumlah	5263	22	40	0	2	0	5327

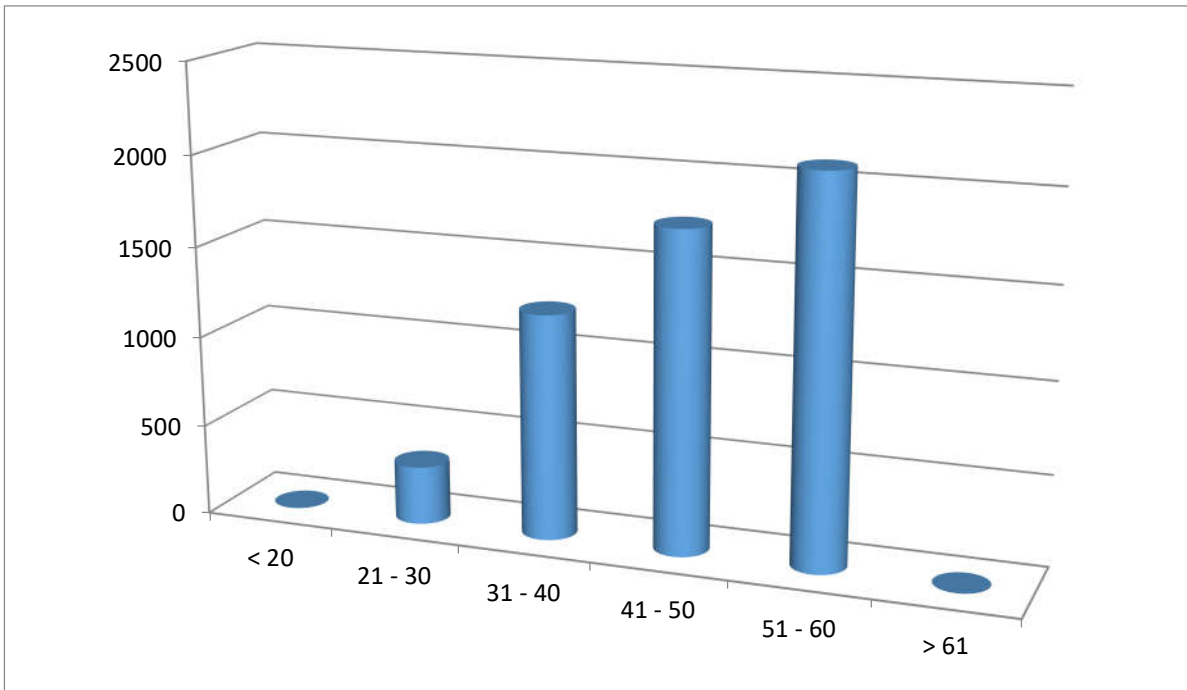
TABEL 2.15 JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER-OPD

No	Unit Organisasi / OPD	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	13	14	27
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	10	18
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	31	37	68
4	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10	14	24
5	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	15	39	54
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	24	38
7	DINAS KESEHATAN	630	156	786
8	DINAS KETENAGA KERJAAN	11	7	18
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	16	26
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	40	51
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	34	37	71
12	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13	19	32
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15	110	125
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	11	20
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13	13	26
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	11	20
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1609	1190	2799
18	DINAS PERHUBUNGAN	4	42	46
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12	62	74
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18	15	33
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13	24	37

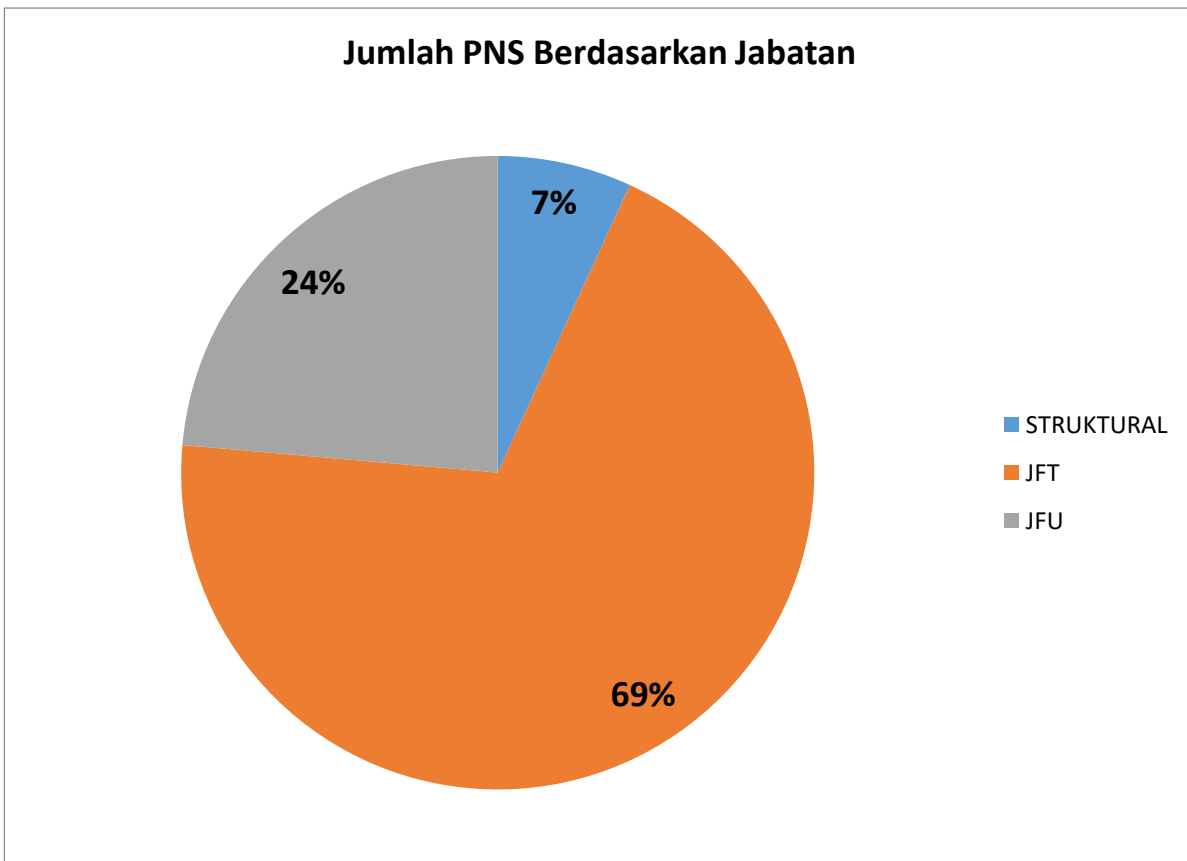
22	DINAS SOSIAL	7	13	20
23	INSPEKTORAT DAERAH	26	18	44
24	KECAMATAN BANDAR	5	14	19
25	KECAMATAN BANYUPUTIH	3	9	12
26	KECAMATAN BATANG	25	46	71
27	KECAMATAN BAWANG	4	9	13
28	KECAMATAN BLADO	5	6	11
29	KECAMATAN GRINGSING	4	8	12
30	KECAMATAN KANDEMAN	1	10	11
31	KECAMATAN LIMPUNG	4	7	11
32	KECAMATAN PECALUNGAN	0	9	9
33	KECAMATAN REBAN	1	16	17
34	KECAMATAN SUBAH	2	10	12
35	KECAMATAN TERSONO	3	9	12
36	KECAMATAN TULIS	2	11	13
37	KECAMATAN WARUNGASEM	4	8	12
38	KECAMATAN WONOTUNGGAL	5	8	13
39	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	15	24
40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BATANG	219	110	329
41	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG	67	29	96
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6	39	45
43	SEKRETARIAT DAERAH	33	66	99
44	SEKRETARIAT DPRD	5	24	29
		2942	2385	5327

GAMBAR 2.1. JUMLAH PNS DALAM GRAFIK

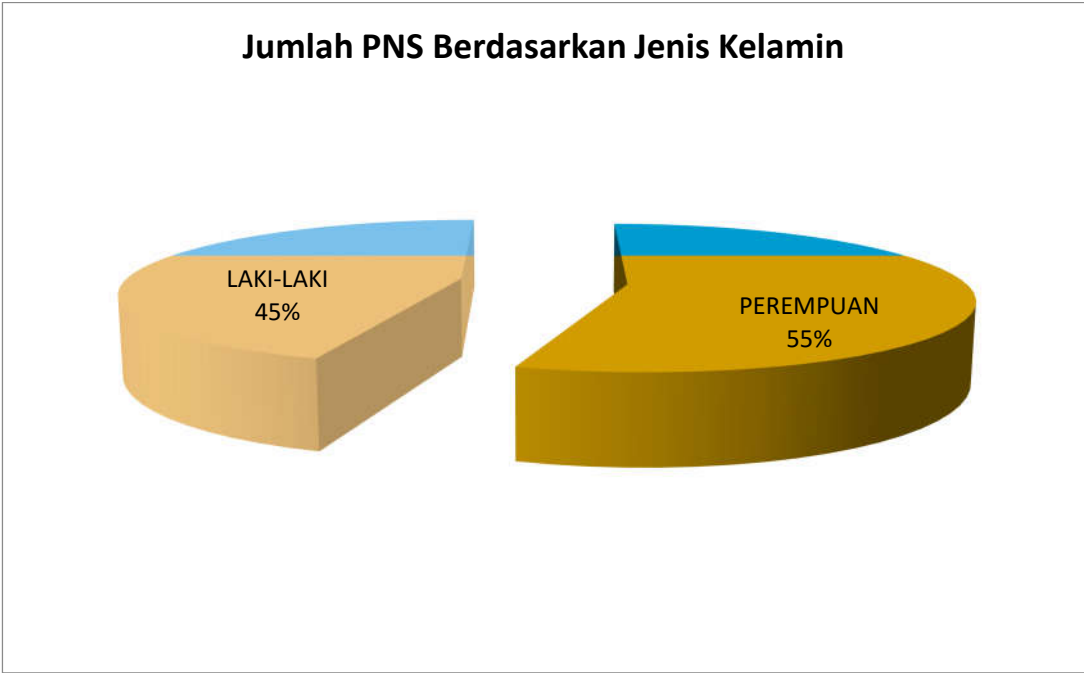
a. Berdasarkan Usia



b. Berdasarkan Jenis Jabatan



c. Berdasarkan Jenis Kelamin



d. Berdasarkan Agama

